

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat sekarang ini sedang dihadapkan pada permasalahan perekonomian, sosial politik dan juga hankamnas. Pembangunan yang dilaksanakan harus benar-benar mewujudkan suatu efektivitas pada peningkatan kehidupan rakyat banyak bukan hanya untuk sekelompok masyarakat saja.

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan-perbaikan menuju arah tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu tidak akan tercapai dengan baik apabila segala upaya pembangunan tidak diarahkan sedemikian rupa dengan rencana yang ditetapkan. Salah satu upaya yang penting dalam hal ini adalah peranan pengawasan guna mengendalikan seluruh fasilitas dan peralatan yang dipergunakan di dalam proses pelaksanaannya, sehingga dalam pencapaian tujuan digariskan akan tercipta.

Kemudian di dalam proses pengawasan itu sendiri harus diusahakan berjalan dengan efisien dan efektif. Untuk itu pengawasan yang baik haruslah didasari dengan sistem yang baik pula. Hal tersebut sangat penting sebab pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan organisasi, melainkan adalah suatu alat yang akan memperjancar pencapaian tujuan yang baik di dalam suatu organisasi. Dengan kata lain janganlah pengawasan malah akan menghambat usaha peningkatan efisiensi dan

efektivitas.

Jelaslah bahwa pengawasan sangat menentukan perannya di dalam proses pencapaian tujuan. Bahkan secara filosofis dapat diterima bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia banyak memiliki segi-segi kelemahan yang dapat menyebabkan kesalahan atau kesilapan. Sesuai dengan uraian di atas, manusia perlu diamati bukan berarti mencari-cari kesalahannya dan kemudian menghukumnya. Akan tetapi melalui pengawasan yang baik, di samping mampu memberi kendali sekaligus juga bersifat mendidik dan membimbing.

Pengawasan sebagai salah satu tugas bagian Verifikasi dalam hal pelaksanaan pertanggung jawaban administrasi keuangan daerah pada Biro Keuangan Setdapropsu, sehingga dengan adanya Bagian Verifikasi ini maka akan didapatkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara terutama dalam pelaksanaan pekerjaannya atas pertanggung jawaban administrasi keuangan terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi.

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : "**PERANAN BAGIAN VERIFIKASI ATAS PERTANGGUNG**

JAWABAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PADA BIRO KEUANGAN SETDAPROPSU

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Peranan berarti menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).¹
- Bagian Verifikasi adalah salah satu Bagian dari struktur organisasi yang terdapat di dalam tatanan kerja di Biro Keuangan Setdapropsu, yang mana pada dasarnya tugas utama Bagian verifikasi ini adalah memberikan pengawasan atas pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
- Atas Pertanggung jawaban diartikan berupa suatu sebab akibat dari suatu pelaksanaan tugas.
- Administrasi Keuangan Daerah adalah keseluruhan proses kegiatan pengelolaan keuangan daerah agar apa yang diinginkan daerah dalam jangka waktu tertentu dapat dicapai berdaya guna dan berhasil guna.²
- Daerah merupakan bagian dari suatu negara .
- Pada menunjukkan suatu tempat.
- Biro Keuangan Setdapropsu adalah salah satu biro yang terdapat di

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 755.

² D.J. Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal. 17.

Jingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar fungsi yang diberikan oleh Bagian Verifikasi pada Biro Keuangan Setdapropsu di dalam melakukan tata kerja serta kewenangannya terutama dalam hal memberikan pemberian pertanggung jawaban atas keuangan daerah.

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam organisasi yang luas seperti negara dan pemerintah yang harus melaksanakan pekerjaan yang beraneka ragam dan banyak jumlahnya, terlebih di dalam hal mengamankan masalah keuangannya perlu dibuat badan-badan yang mempunyai tugas untuk itu. Pada perangkat pemerintahan di daerah, Bagian Verifikasi merupakan salah satu unit organisasi yang menyelenggarakan pengawasan, dan salah satu sasaran pengawasannya adalah masalah keuangan di daerah.

Bagian Verifikasi Biro Keuangan Sekdapropsu merupakan alat pemerintah daerah maka secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara yaitu fungsi pengawasan sebagaimana layaknya tugas lembaga tersebut.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah ada diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 86, pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungan APBD. Kemudian ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1978 tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan material daerah dan lain-lain ketentuan yang berlaku berkenaan dengan keuangan daerah, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa tugas Bagian Verifikasi ini sangat kompleks terutama menilik ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka adalah sangat menarik untuk melihat lebih jauh tugas Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu terutama di dalam pelaksanaan pengawasan keuangan daerah sehingga dengan demikian akan dapat diberikan pertanggung jawaban atas keuangan daerah.

C. Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.